

# *Jurnal* Ekonomi & Kebijakan Publik

Mensinergikan Kebijakan dan Pemberdayaan Ekonomi

VOL. 7, NO. 2, DESEMBER 2016

ISSN: 2086-6313

**AGENDA-SETTING PEMBANGUNAN PLTN DAN PENCAPAIAN KETAHANAN LISTRIK  
(STUDI DI JEPARA DAN PANGKAL PINANG)**

*Hariyadi*

**ANALISIS SKEMA ALTERNATIF KREDIT PROGRAM UNTUK USAHA MIKRO,  
KECIL, DAN MENENGAH**

*Abdul Aziz dan Eko Wicaksono*

**PENGARUH MAKROEKONOMI TERHADAP *NON PERFORMING LOAN* (NPL) PERBANKAN**

*Ari Mulianta Ginting*

**PERANAN MODAL SOSIAL DALAM PENGURANGAN KEMISKINAN RUMAH TANGGA  
DI PERDESAAN INDONESIA**

*Ahmadriskan Nasution*

**HARMONISASI KEBIJAKAN HULU-HILIR DALAM PENGEMBANGAN BUDIDAYA DAN  
INDUSTRI PENGOLAHAN KAKAO NASIONAL**

*Daru Mulyono*

**ANALISIS KLASTER INDUSTRI DALAM PERSPEKTIF MANAJEMEN RANTAI PASOKAN  
PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DI PROVINSI SUMATERA UTARA**

*Saut H. Siahaan*

**KEBIJAKAN PELARANGAN PENANGKAPAN IKAN TUNA SIRIP KUNING:  
ANALISIS DAMPAK DAN SOLUSINYA**

*Lukman Adam*

**HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN**

# *Jurnal* Ekonomi & Kebijakan Publik

Mensinergikan Kebijakan dan Pemberdayaan Ekonomi

VOL. 7, NO. 2, DESEMBER 2016

ISSN: 2086-6313

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	v-vii
Abstrak .....	ix-xvi
<b>AGENDA-SETTING PEMBANGUNAN PLTN DAN PENCAPAIAN KETAHANAN LISTRIK (STUDI DI JEPARA DAN PANGKAL PINANG)</b>	
<i>Hariyadi</i> .....	127-142
<b>ANALISIS SKEMA ALTERNATIF KREDIT PROGRAM UNTUK USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH</b>	
<i>Abdul Aziz dan Eko Wicaksono</i> .....	143-157
<b>PENGARUH MAKROEKONOMI TERHADAP <i>NON PERFORMING LOAN</i> (NPL) PERBANKAN</b>	
<i>Ari Mulianta Ginting</i> .....	159-170
<b>PERANAN MODAL SOSIAL DALAM PENGURANGAN KEMISKINAN RUMAH TANGGA DI PERDESAAN INDONESIA</b>	
<i>Ahmadriskan Nasution</i> .....	171-183
<b>HARMONISASI KEBIJAKAN HULU-HILIR DALAM PENGEMBANGAN BUDIDAYA DAN INDUSTRI PENGOLAHAN KAKAO NASIONAL</b>	
<i>Daru Mulyono</i> .....	185-200
<b>ANALISIS KLASTER INDUSTRI DALAM PERSPEKTIF MANAJEMEN RANTAI PASOKAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DI PROVINSI SUMATERA UTARA</b>	
<i>Saut H. Sihahan</i> .....	201-213
<b>KEBIJAKAN PELARANGAN PENANGKAPAN IKAN TUNA SIRIP KUNING: ANALISIS DAMPAK DAN SOLUSINYA</b>	
<i>Lukman Adam</i> .....	215-227

**HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena dengan ridanya Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik (JEKP) kembali hadir di hadapan pembaca budiman dengan tujuh tulisan yang membahas hasil penelitian dan kajian terhadap sejumlah isu ekonomi dan kebijakan publik. JEKP telah menerima tulisan dari berbagai sumber, baik dari internal di lingkungan Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI maupun dari sejumlah universitas dan kementerian/lembaga. Dalam edisi ini, ketujuh tulisan tersebut membahas isu pembangunan infrastruktur listrik; usaha mikro, kecil dan menengah; perbankan; kemiskinan; perindustrian; perkebunan; dan perikanan. Beragamnya isu yang dibahas diharapkan semakin memperkokoh fondasi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya bidang ekonomi dan kebijakan publik.

Tulisan yang berjudul **“Agenda-Setting Pembangunan PLTN dan Pencapaian Ketahanan Listrik (Studi di Jepara dan Pangkal Pinang)”** ditulis oleh Hariyadi mengawali jurnal edisi kali ini. Penulis membahas mengenai proses *agenda-setting* pembangunan PLTN yang pernah menjadi kebijakan formal pada masa pemerintahan sebelumnya dan pada akhirnya dibatalkan sampai sekarang belum menunjukkan arah perubahan yang berarti. Studi dengan pendekatan kualitatif dan berbasis sumber data primer dan sekunder yang dilakukan di Kabupaten Jepara, Provinsi Jateng dan Pangkal Pinang, Provinsi Babel, ditujukan untuk melihat sejauh mana gambaran perkembangan wacana dan kelayakan pembangunan PLTN untuk mendukung program pembangkit listrik nasional dalam jangka panjang. Hasil studi menunjukkan bahwa (1) dinamika *agenda-setting* pembangunan PLTN belum menunjukkan adanya kemauan politik dari pemerintah seiring dengan masih terbatasnya respons dukungan publik dan Pemda, dan (2) kelayakan pembangunan PLTN bagaimana pun akan tetap menjadi pilihan yang rasional dalam jangka panjang untuk ketahanan energi (listrik) nasional. Dengan demikian, ketika proses *agenda-setting* pembangunan PLTN telah menjadi putusan formal, pemerintah masih harus mengelola tantangan implementasinya secara sosial dan politik.

Tulisan kedua berjudul **“Analisis Skema Alternatif Kredit Program untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah”** ditulis oleh Abdul Aziz dan Eko Wicaksono. Kedua penulis menganalisis pemberian fasilitas kredit kepada unit usaha mikro, baik melalui skema penjaminan kredit seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) maupun melalui skema subsidi bunga seperti Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E) dan Kredit Usaha Pembibitan Sapi (KUPS). Terdapat permasalahan besar dalam implementasi seperti besarnya risiko terjadinya *default*, *prudentiality* dari bank pelaksana yang terlalu tinggi, serta ketidaktepatan penyaluran. Permasalahan tersebut tidak terlepas dari permasalahan dasar di *credit market*, yaitu *asymmetric information* yang meliputi *adverse selection* dan *moral hazard*. Permasalahan ini pada akhirnya berujung pada tidak optimalnya penyerapan kredit program. Potret permasalahan tersebut sebagai pendorong untuk melakukan analisis desain alternatif skema kredit program. Skema tersebut mencakup institusi yang seharusnya dilibatkan dalam implementasi program tersebut sehingga terwujud *credit market* yang berkelanjutan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Keberadaan lembaga keuangan mikro (LKM) dianggap dapat mengatasi kedua permasalahan dasar tersebut mengingat LKM memiliki akses informasi yang lebih bagus terkait calon debitur. Salah satu rekomendasi yang diajukan adalah melakukan penyatuan format kredit program dan pada mengusulkan LKM sebagai salah satu pelaksana dari kredit program untuk memperluas akses kredit bagi UMKM di Indonesia.

Tulisan ketiga ditulis oleh Ari Muliarta Ginting, berjudul **“Pengaruh Makroekonomi terhadap Non Performing Loan (NPL) Perbankan”**. Tulisan ini menganalisis kondisi makroekonomi Indonesia sebagai suatu hal yang harus diperhatikan bagi penyaluran kredit perbankan. Studi ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan kredit dan kredit macet (NPL) perbankan di Indonesia dan mengetahui pengaruh variabel makroekonomi terhadap NPL perbankan di Indonesia. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif untuk menjawab permasalahan penelitian yang ada. Pendekatan kuantitatif menggunakan metode *dynamic panel data*, yang menggunakan data dari tahun 2006-2014. Hasil studi menunjukkan bahwa perkembangan kredit dalam periode penelitian mengalami tren meningkat, di mana peningkatan kredit yang disalurkan oleh perbankan diikuti oleh peningkatan NPL perbankan. Studi ini juga menemukan bahwa ternyata kondisi makroekonomi, terutama GDP, memiliki pengaruh yang negatif terhadap NPL. Artinya semakin membaiknya perekonomian yang ditandai dengan semakin meningkatnya pertumbuhan ekonomi maka akan semakin mengurangi NPL dan memiliki pengaruh yang positif dengan variabel tingkat suku bunga

pinjaman, dan inflasi. Berdasarkan temuan tersebut maka diperlukan sinergitas diperlukan sinergitas antara pemerintah sebagai otoritas fiskal dengan Bank Indonesia untuk menciptakan kondisi makroekonomi yang baik yang dapat mengurangi kredit macet perbankan di Indonesia.

Tulisan keempat berjudul **“Peranan Modal Sosial dalam Pengurangan Kemiskinan Rumah Tangga di Perdesaan Indonesia”** ditulis oleh Ahmadriswan Nasution. Penulis menganalisis peran modal sosial terhadap kemiskinan rumah tangga perdesaan di Indonesia. Modal sosial diukur dengan indeks dimensi modal sosial (saling percaya, norma, gotong royong, partisipasi dalam kegiatan sosial, dan jejaring sosial), sedangkan kemiskinan diukur dengan pengeluaran per kapita rumah tangga. Metode analisis menggunakan model regresi linier berganda dengan sampel sebanyak 40.474 rumah tangga. Adapun sumber data dari hasil survei berskala nasional yang dilakukan oleh BPS, yaitu Susenas 2012 dan Podes tahun 2011. Hasil analisis menunjukkan bahwa rata-rata indeks modal sosial rumah tangga di perdesaan sebesar 52,18 (maksimum 100). Adapun komponen yang paling berperan dalam pembentukan modal sosial rumah tangga miskin adalah rasa saling percaya. Hasil analisis juga menunjukkan bahwa modal sosial bersama-sama dengan modal manusia, modal keuangan, dan modal fisik memberikan efek positif terhadap pengeluaran per kapita rumah tangga, sehingga dapat mengurangi kemiskinan. Hal ini menunjukkan bahwa modal sosial berperan penting dalam pengurangan kemiskinan di perdesaan. Pemerintah dan pihak terkait diharapkan membuat kebijakan yang memfasilitasi pengembangan modal sosial dalam upaya pengurangan kemiskinan di perdesaan Indonesia.

Tulisan kelima ditulis oleh Daru Mulyono, dengan judul **“Harmonisasi Kebijakan Hulu-Hilir dalam Pengembangan Budidaya dan Industri Pengolahan Kakao Nasional”**. Tulisan ini mengangkat isu industri pengolahan kakao yang mengalami kesulitan karena kekurangan pasokan bahan baku biji kakao sehingga belum berkembang optimal. Kajian ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih jelas dalam upaya pengembangan agribisnis kakao nasional yang dilakukan melalui harmonisasi dan sinkronisasi kebijakan hulu-hilir dalam pengembangan budidaya dan industri pengolahan kakao. Kajian ini merupakan kajian deskriptif analitik dengan analisis data dilakukan melalui (a) penelaahan dokumen-dokumen kebijakan yang terkait dengan pengembangan kakao dan (b) perumusan konsep untuk meningkatkan produksi kakao dan mengembangkan industri pengolahan kakao dalam negeri. Untuk menunjang upaya pengembangan agribisnis kakao tersebut pemerintah telah melaksanakan program peningkatan produksi kakao melalui Gernas Kakao dan untuk pengembangan industri pengolahan kakao pemerintah telah pula menerapkan kebijakan pengenaan Bea Keluar (BK) ekspor biji kakao melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 67/PMK.011/2010 untuk menjamin pasokan bahan baku biji kakao. Hasil dilaksanakannya program Gernas Kakao dan diberlakukannya BK tersebut menunjukkan bahwa volume ekspor kakao dalam bentuk biji terus menurun dan sebaliknya volume ekspor produk olahan kakao terus meningkat. Dampak kebijakan tersebut akan semakin nyata dalam pengembangan agribisnis kakao bila dilakukan melalui perumusan kebijakan yang harmonis dan sinergis antara aspek budidaya kakao (sektor hulu) dan industri pengolahan kakao (sektor hilir).

Tulisan keenam berjudul **“Analisis Klaster Industri dalam Perspektif Manajemen Rantai Pasokan Perkebunan Kelapa Sawit di Provinsi Sumatera Utara”** ditulis oleh Saut Siahaan. Penulis menganalisis klaster industri yang dilihat dari perspektif rantai pasokan industri pengolahan kelapa sawit. Tulisan ini merupakan hasil penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif eksploratif dan data primer diperoleh melalui wawancara yang mendalam dengan para pelaku dalam rantai pasokan industri pengolahan kelapa sawit di Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2015. Hasil analisis menunjukkan bahwa perkebunan rakyat mempunyai kontribusi yang cukup besar dalam memasok bahan baku Tandan Buah Segar (TBS) untuk industri pengolahan kelapa sawit, oleh karenanya keberadaan perkebunan rakyat tidak dapat dikesampingkan dalam pengembangan industri hilir kelapa sawit. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa masih perlu didorong terbangunnya struktur tata kelola rantai pasokan industri kelapa sawit, strategi peningkatan, distribusi, dan keadilan agar distribusi manfaat bagi para pelaku dalam rantai pasokan dapat terbangun. Berkenaan dengan hal ini maka upaya untuk mempromosikan usaha industri perkebunan yang berkelanjutan masih sangat perlu, terutama untuk melestarikan keanekaragaman hayati dan menguntungkan para pelaku dalam rantai pasokan industri kelapa sawit.

Tulisan ketujuh ditulis oleh Lukman Adam dengan judul **“Kebijakan Pelarangan Penangkapan Ikan Tuna Sirip Kuning: Analisis Dampak dan Solusinya”**. Tulisan ini bertujuan untuk (a) mengevaluasi konsep dan alasan diterbitkannya Permen KP No. 4 Tahun 2015, (b) menganalisis dampak teknis, sosial-ekonomi, lingkungan, dan solusi yang perlu dilakukan akibat terbitnya kebijakan tersebut, serta (c) merumuskan reorientasi kebijakan yang diperlukan. Kajian ini merupakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. sedangkan yang digunakan adalah analisis deskriptif. Permen KP tersebut tidak didasarkan pada kajian akademis formal yang memadai. Dampak teknis yang ditemukan adalah pelarangan penggunaan pukat cincin sejak tahun

2015 dan modernisasi armada penangkapan hasil perikanan. Dampak sosial-ekonomi yang ditemui adalah pendapatan per kapita nelayan per tahun pada tahun 2015 meningkat 1,46 persen dan tidak ada gejolak sosial di nelayan. Dampak lingkungan, yaitu potensi Ikan Tuna Sirip Kuning tetap stabil dan kesadaran nelayan terhadap lingkungan tinggi. Reorientasi kebijakan pemerintah harus sudah mulai dilakukan yang mengarah pada inklusifitas perikanan. Keberanian pemerintah pusat untuk melakukan pengelolaan perikanan tertutup pada sebuah WPP didasarkan pada dimensi lokasi dan waktu harus bisa diterapkan di WPP yang sudah mengalami tangkap lebih dan daerah tempat bertelur ikan. Namun kebijakan ini harus didukung oleh kajian dan data memadai.

Besar harapan kami semoga tulisan-tulisan tersebut dapat memberikan manfaat dan menambah khasanah keilmuan bagi seluruh pemangku kepentingan, khususnya Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia (DPR RI) dalam menjalankan tugas-tugas konstitusionalnya. Ucapan terima kasih dan penghargaan yang besar disampaikan kepada seluruh Mitra Bestari dan redaktur pelaksana yang telah berperan aktif dalam memberikan masukan dan perbaikan, baik secara substansial maupun redaksional. Ucapan terima kasih tak lupa disampaikan kepada seluruh jajaran sekretariat dan tata usaha yang telah mendukung suksesnya penerbitan jurnal edisi ini. Terakhir tetapi tidak kalah pentingnya, terima kasih dan penghargaan juga sepatutnya disampaikan kepada Kapuslit BKD, di mana tanpa dukungan kedinasan maka program penerbitan mustahil akan dapat diraih.

Jakarta, 30 Desember 2016

Hormat kami,  
Dewan Redaksi

**HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN**



# Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik

Mensinergikan Kebijakan dan Pemberdayaan Ekonomi

VOL. 7, NO. 2, DESEMBER 2016

ISSN: 2086-6313

Kata kunci bersumber dari artikel. Lembar abstrak ini boleh difotokopi.

**Hariyadi** (Puslit, Bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik)

## **AGENDA-SETTING PEMBANGUNAN PLTN DAN PENCAPAIAN KETAHANAN LISTRIK (STUDI DI JEPARA DAN PANGKAL PINANG)**

*JEKP*, Vol. 7, No. 2, Desember 2016, hal. 127-142

### **Abstrak**

Proses *agenda-setting* pembangunan PLTN yang pernah menjadi kebijakan formal pada masa pemerintahan sebelumnya dan pada akhirnya dibatalkan sampai sekarang belum menunjukkan arah perubahan yang berarti. Namun kuatnya persoalan politik dalam konteks kentalnya resistensi sosial yang beragam, baik dari masyarakat di sekitar tapak PLTN dan masyarakat secara umum, akademisi, pegiat anti-nuklir dan sebagian pemangku kepentingan utama menjadikan proses ini masih tetap belum mengarah pada proses pengambilan keputusan secara formal. Meskipun demikian, dalam hal untuk ketahanan listrik maka kelayakan pembangunan PLTN akan menjadi pilihan yang tetap rasional dalam jangka panjang. Studi dengan pendekatan kualitatif dan berbasis sumber data primer dan sekunder dilakukan di Kabupaten Jepara, Provinsi Jateng dan Pangkal Pinang, Provinsi Babel, ditujukan untuk melihat sejauh mana gambaran perkembangan wacana dan kelayakan pembangunan PLTN selama ini dalam mendukung program pembangkit listrik nasional dalam jangka panjang. Hasil studi ini menunjukkan bahwa (1) dinamika *agenda-setting* pembangunan PLTN belum menunjukkan adanya kemauan politik dari pemerintah seiring dengan masih terbatasnya respons dukungan publik dan Pemda dan (2) kelayakan pembangunan PLTN bagaimana pun akan tetap menjadi pilihan yang rasional dalam jangka panjang untuk ketahanan energi (listrik) nasional. Dengan demikian, ketika proses *agenda-setting* pembangunan PLTN telah menjadi putusan formal, pemerintah masih harus mengelola tantangan implementasinya secara sosial dan politik. Kata kunci: PLTN, program listrik 35.000 MW, *agenda-setting*, ketahanan energi, implementasi kebijakan

Abdul Aziz dan Eko Wicaksono (Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan)

### **ANALISIS SKEMA ALTERNATIF KREDIT PROGRAM UNTUK USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH**

*JEKP*, Vol. 7, No. 2, Desember 2016, hal. 143-157

#### **Abstrak**

Pemerintah Indonesia memiliki komitmen untuk mengurangi angka kemiskinan di Indonesia. Salah satu program kegiatan yang digulirkan adalah dengan pemberian fasilitas kredit kepada unit usaha mikro, baik melalui skema penjaminan kredit seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) maupun melalui skema subsidi bunga seperti Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E) dan Kredit Usaha Pembibitan Sapi (KUPS). Namun demikian, terdapat permasalahan besar dalam implementasi, seperti besarnya risiko terjadinya *default*, *prudentality* dari bank pelaksana yang terlalu tinggi, serta ketidaktepatan penyaluran. Permasalahan tersebut tidak terlepas dari permasalahan dasar di *credit market*, yaitu *asymmetric information* yang meliputi *adverse selection* dan *moral hazard*. Oleh sebab itu, permasalahan ini pada akhirnya berujung pada tidak optimalnya penyerapan kredit program. Hal tersebut akan menghambat akses calon debitur kepada permodalan pada waktu yang tepat, sehingga tidak menutup kemungkinan calon debitur tersebut akhirnya mengandalkan akses modal dari lembaga keuangan informal dengan tingkat bunga yang cukup tinggi. Potret permasalahan tersebut mendasari penelitian ini untuk menganalisis lebih lanjut desain alternatif skema kredit program. Skema tersebut mencakup institusi yang seharusnya dilibatkan dalam implementasi program sehingga terwujud *credit market* yang berkelanjutan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Keberadaan lembaga keuangan mikro (LKM) dianggap dapat mengatasi kedua permasalahan dasar tersebut mengingat LKM memiliki akses informasi yang lebih bagus terkait calon debitur. Oleh sebab itu, salah satu rekomendasi yang diajukan adalah melakukan penyatuan format kredit program dan pada akhirnya mengusulkan LKM sebagai salah satu pelaksana dari kredit program untuk memperluas akses kredit bagi UMKM di Indonesia.

Kata kunci: kredit program, akses permodalan, UMKM, LKM

Ari Muliarta Ginting (Puslit, Bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik)

### **PENGARUH MAKROEKONOMI TERHADAP *NON PERFORMING LOAN* (NPL) PERBANKAN**

*JEKP*, Vol. 7, No. 2, Desember 2016, hal. 159-170

#### **Abstrak**

Salah satu industri yang memiliki keterkaitan dengan makroekonomi adalah industri perbankan, hal ini dikarenakan industri perbankan sangat peka dengan kondisi perekonomian suatu negara. Jika suatu perekonomian suatu negara sedang berkembang, maka industri perbankan juga dapat berkembang. Namun kondisi sebaliknya ketika perekonomian sedang mengalami krisis, maka hal ini dapat mengakibatkan dampak terhadap industri perbankan. Oleh karena itu kondisi makroekonomi Indonesia menjadi suatu hal yang harus diperhatikan bagi penyaluran kredit perbankan. Studi ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan kredit dan kredit macet (NPL) perbankan di Indonesia dan mengetahui pengaruh variabel makroekonomi terhadap NPL perbankan di Indonesia. Studi ini menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif menggunakan metode *dynamic panel data* yang menggunakan data dari tahun 2006-2014. Hasil studi ini menunjukkan bahwa perkembangan kredit dalam periode tersebut mengalami tren meningkat, peningkatan kredit yang disalurkan oleh perbankan diikuti oleh peningkatan NPL perbankan. Studi ini juga menemukan bahwa ternyata kondisi makroekonomi, terutama GDP, memiliki pengaruh yang negatif terhadap NPL. Artinya jika semakin membaiknya perekonomian yang ditandai dengan semakin meningkatnya pertumbuhan ekonomi akan semakin mengurangi NPL dan memiliki pengaruh yang positif dengan variabel tingkat suku bunga pinjaman serta inflasi. Berdasarkan temuan tersebut maka diperlukan sinergitas antara pemerintah sebagai otoritas fiskal dengan Bank Indonesia untuk menciptakan kondisi makroekonomi yang baik yang dapat mengurangi kredit macet perbankan di Indonesia.

Kata kunci: makroekonomi, industri perbankan, kredit macet

Ahmadriswan Nasution (Pusat Pendidikan dan Pelatihan, BPS)

### **PERANAN MODAL SOSIAL DALAM PENGURANGAN KEMISKINAN RUMAH TANGGA DI PERDESAAN INDONESIA**

*JEKP*, Vol. 7, No. 2, Desember 2016, hal. 171-183

#### **Abstrak**

Kebijakan pengurangan kemiskinan di Indonesia cenderung mengandalkan pendekatan ekonomi, seperti pembangunan infrastruktur (modal fisik), bantuan kredit (modal keuangan), dan bantuan pendidikan dan kesehatan (modal manusia). Padahal, kemiskinan merupakan persoalan yang kompleks, melibatkan banyak sumber daya termasuk modal sosial. Penelitian ini menganalisis peran modal sosial terhadap kemiskinan rumah tangga perdesaan di Indonesia. Modal sosial diukur berdasarkan indeks dimensi modal sosial (saling percaya, norma, gotong royong, partisipasi dalam kegiatan sosial, dan jejaring sosial), sedangkan kemiskinan diukur dengan pengeluaran per kapita rumah tangga. Metode analisis menggunakan model regresi linier berganda pada sampel sebanyak 40.474 rumah tangga. Adapun sumber data dari hasil survei berskala nasional yang dilakukan oleh BPS, yaitu Susenas tahun 2012 dan Podes tahun 2011. Hasil analisis menunjukkan bahwa rata-rata indeks modal sosial rumah tangga di perdesaan sebesar 52,18 (maksimum 100). Adapun komponen yang paling berperan dalam pembentukan modal sosial rumah tangga miskin adalah rasa saling percaya. Hasil analisis juga menunjukkan bahwa modal sosial bersama-sama dengan modal manusia, modal keuangan, dan modal fisik memberikan efek positif terhadap pengeluaran per kapita rumah tangga, sehingga dapat mengurangi kemiskinan. Hal ini menunjukkan bahwa modal sosial berperan penting dalam pengurangan kemiskinan di perdesaan. Pemerintah dan pihak terkait diharapkan membuat kebijakan yang memfasilitasi pengembangan modal sosial dalam upaya pengurangan kemiskinan di perdesaan Indonesia.

Kata kunci: modal sosial, pengeluaran per kapita rumah tangga, kemiskinan, perdesaan, Indonesia

Daru Mulyono (Pusat Teknologi Produksi Pertanian, BPPT)

### **HARMONISASI KEBIJAKAN HULU-HILIR DALAM PENGEMBANGAN BUDIDAYA DAN INDUSTRI PENGOLAHAN KAKAO NASIONAL**

*JEKP*, Vol. 7, No. 2, Desember 2016, hal. 185-200

#### **Abstrak**

Produktivitas kakao di Indonesia tergolong rendah, tercatat pada tahun 2013 produksi biji kakao hanya mencapai 414 kg/ha/tahun jauh di bawah rata-rata ideal yang mencapai 2.000 kg/ha/tahun. Demikian pula dalam industri pengolahan kakao yang mengalami kesulitan karena kekurangan pasokan bahan baku biji kakao sehingga belum berkembang optimal. Kajian ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih jelas dalam upaya pengembangan agribisnis kakao nasional yang dilakukan melalui harmonisasi dan sinkronisasi kebijakan hulu-hilir dalam pengembangan budidaya dan industri pengolahan kakao. Kajian ini merupakan kajian deskriptif analitik dengan analisis data dilakukan melalui (a) penelaahan dokumen-dokumen kebijakan yang terkait dengan pengembangan kakao dan (b) perumusan konsep untuk meningkatkan produksi kakao dan mengembangkan industri pengolahan kakao dalam negeri. Untuk menunjang upaya pengembangan agribisnis kakao tersebut pemerintah telah melaksanakan program peningkatan produksi kakao melalui Gernas Kakao dan untuk pengembangan industri pengolahan kakao pemerintah telah pula menerapkan kebijakan pengenaan Bea Keluar ekspor biji kakao melalui Peraturan Menteri Keuangan No. 67/PMK.011/2010 untuk menjamin pasokan bahan baku biji kakao. Hasil dilaksanakannya program Gernas Kakao dan diberlakukannya BK tersebut menunjukkan bahwa volume ekspor kakao dalam bentuk biji terus menurun dan sebaliknya volume ekspor produk olahan kakao terus meningkat. Dampak kebijakan tersebut akan semakin nyata dalam pengembangan agribisnis kakao bila dilakukan melalui perumusan kebijakan yang harmonis dan sinergis antara aspek budidaya kakao (sektor hulu) dan industri pengolahan kakao (sektor hilir).

Kata kunci: budidaya kakao, pengolahan, agribisnis kakao, kebijakan industri

Saut H. Siahaan (Pusat Penelitian Perkembangan Iptek (Pappiptek), LIPI)

### **ANALISIS KLASTER INDUSTRI DALAM PERSPEKTIF MANAJEMEN RANTAI PASOKAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DI PROVINSI SUMATERA UTARA**

*JEKP*, Vol. 7, No. 2, Desember 2016, hal. 201-213

#### **Abstrak**

Pengembangan industri hilir kelapa sawit melalui penerapan konsep klaster di Provinsi Sumatera Utara menjadi harapan pemerintah untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk. Namun demikian, apakah konsep ini dapat mendorong daya saing industri kelapa sawit yang berdaya saing ternyata masih menjadi tantangan. Hal ini terutama terkait dengan kondisi keragaman para pelaku dalam rantai pasokan industrinya serta adanya tuntutan persaingan usaha dalam pasar global yang mengikutkan aspek lingkungan. Oleh karena itu, analisis klaster industri yang dilihat dari perspektif rantai pasokan industri pengolahan kelapa sawit menjadi menarik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif eksploratif dan memperoleh data primer dari wawancara mendalam dengan para pelaku dalam rantai pasokan industri pengolahan kelapa sawit di Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2015. Hasil analisis menunjukkan bahwa perkebunan rakyat mempunyai kontribusi yang cukup besar dalam memasok bahan baku Tandan Buah Segar untuk industri pengolahan kelapa sawit, oleh karenanya keberadaan perkebunan rakyat tidak dapat dikesampingkan dalam pengembangan industri hilir kelapa sawit. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa masih perlu didorong pembangunan struktur tata kelola rantai pasokan industri kelapa sawit, strategi peningkatan, distribusi, dan keadilan agar distribusi manfaat bagi para pelaku dalam rantai pasokan dapat dirasakan. Berkenaan dengan hal ini maka upaya untuk mempromosikan usaha industri perkebunan yang berkelanjutan masih sangat perlu, terutama untuk melestarikan keanekaragaman hayati dan menguntungkan para pelaku dalam rantai pasokan industri kelapa sawit.

Kata kunci: klaster industri, rantai pasokan, kelapa sawit, industri hilir

Lukman Adam (Puslit, Bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik)

### **KEBIJAKAN PELARANGAN PENANGKAPAN IKAN TUNA SIRIP KUNING: ANALISIS DAMPAK DAN SOLUSINYA**

*JEKP*, Vol. 7, No. 2, Desember 2016, hal. 215-227

#### **Abstrak**

Permen Kelautan dan Perikanan No. 4 Tahun 2015 tentang Larangan Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) RI 714 merupakan hal baru dalam pengelolaan perikanan di Indonesia. Permen KP tersebut berisikan larangan penangkapan Ikan Tuna Sirip Kuning pada titik koordinat 126 – 132° BT dan 4 – 6° LS di Laut Banda, di bulan Oktober–Desember. Kajian ini bertujuan (a) mengevaluasi konsep dan alasan diterbitkannya Permen KP No. 4 Tahun 2015; (b) menganalisis dampak teknis, sosial-ekonomi, dan lingkungan dan solusi yang perlu dilakukan akibat terbitnya kebijakan tersebut; serta (c) merumuskan reorientasi kebijakan yang diperlukan. Kajian ini merupakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Permen KP tersebut tidak didasarkan pada kajian akademis formal yang memadai. Dampak teknis yang ditemukan adalah pelarangan penggunaan pukat cincin sejak tahun 2015 dan modernisasi armada penangkapan hasil perikanan. Dampak sosial-ekonomi yang ditemui adalah pendapatan per kapita nelayan per tahun pada tahun 2015 meningkat 1,46 persen dan tidak ada gejolak sosial di nelayan. Dampak lingkungan, yaitu potensi Ikan Tuna Sirip Kuning tetap stabil dan kesadaran nelayan terhadap lingkungan tinggi. Reorientasi kebijakan pemerintah harus sudah mulai dilakukan yang mengarah pada inklusifitas perikanan. Keberanian pemerintah pusat untuk melakukan pengelolaan perikanan tertutup pada sebuah WPP didasarkan pada dimensi lokasi dan waktu harus bisa diterapkan di WPP yang sudah mengalami tangkap lebih dan daerah tempat bertelur ikan. Namun kebijakan ini harus didukung oleh kajian dan data memadai.

Kata kunci: tuna sirip kuning, perikanan berkelanjutan, pengelolaan perikanan tertutup, wilayah pengelolaan perikanan, sumber daya ikan

# *Jurnal* Ekonomi & Kebijakan Publik

Mensinergikan Kebijakan dan Pemberdayaan Ekonomi

VOL. 7, NO. 2, DECEMBER 2016

ISSN: 2086-6313

The keywords noted here are the words which represent the concept applied in a writing. These abstracts are allowed to copy without permission from the publisher and free of charge.

**Hariyadi** (Research Centre, Indonesian House of Representative Expertise Agency)

## **THE AGENDA-SETTING OF NUCLEAR POWER PLANT DEVELOPMENT AND ACHIEVEMENT OF ELECTRICAL RESISTANCE (STUDY CASE IN JEPARA AND PANGKAL PINANG)**

*JEKP*, Vol. 7, No. 2, December 2016, pp. 127-142

### **Abstract**

*Agenda-setting process for the development of nuclear power generation (the PLTN), a process which had ever got a strong political endorsement during the preceding government, has not indicated any significant change. But a strong political issue driven by social oppositions arising both from the potential sites of the generation and the people at large, academicians, anti-nuclear movements and small part of the main related stakeholders have indicated that the process to a formal decision remains uncertain. Nevertheless, in the framework to achieve energy security, for the PLTN development agenda remains a rational alternative in the long run. By using qualitative method and with the focus on the primary and secondary data conducted in the Jepara District, Central Java Province and Pangkal Pinang District, Bangka Belitung Province, this study aims to see the progress of this agenda-setting as well as the feasibility of the agenda in achieving energy security in the long run. The study shows that (1) the agenda-setting process for the PLTN development has not indicated a strong political will from the government due to limited supports from the public and regional governments and (2) the feasibility of the PLTN development itself remains a rational policy option in the long run for sustaining energy security. It is therefore, once the agenda-setting process has come to a formal policy, the government has to manage serious challenges for its implementation politically and socially.*

*Keywords: the PLTN, 35.000 power programme, agenda-setting, energy security, policy implementation*

**Abdul Aziz dan Eko Wicaksono** (Fiscal Policy Agency, Ministry of Finance)

**AN ANALYSIS ON ALTERNATIVE SCHEMES OF CREDIT PROGRAM FOR SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES**

*JEKP*, Vol. 7, No. 2, December 2016, pp. 143-157

**Abstract**

*The Indonesian government is committed to lower down the poverty rate over time. The provision of credit program scheme is one of the programs aimed to assist small and medium enterprises (SMEs) to have broader access to the scheme. Currently, two schemes of the credit program are available for the SMEs: interest rate subsidy scheme and guaranteed scheme. Both of the schemes encounter several challenges in their implementation. Default risk of the creditor, high prudentiality of the executing banks as well as poorly targeted beneficiaries were the problems arising in credit program provision, thus leading to unoptimized use of the available fund. Those problems were associated with the basic problems in credit market: asymmetric information and moral hazard. Therefore, in this study, we would like to propose an alternative scheme as an improvement for that program. Microfinance institutions can be the solution to that problem since they have better access to borrowers compared to executing banks. In other words, the basic problems in credit market could be diminished by developing this particular institution. In this alternative model we emphasize the important role the microfinance institutions could play. By empowering microfinance institutions, it is expected that credit market for small borrowers can be developed, thus leading to greater access to credit for them.*

*Keywords: credit program, credit access, small and medium enterprises, microfinance institution*

**Ari Mulianta Ginting** (Research Centre, Indonesian House of Representative Expertise Agency)

**THE INFLUENCE OF MACROECONOMIC FACTOR TO NON PERFORMING LOAN (NPL) BANKS**

*JEKP*, Vol. 7, No. 2, December 2016, pp. 159-170

**Abstract**

*One of the industries that have been influenced by the macroeconomic condition is the banking industry. It happened because the banking industry is very sensitive to the economic condition of a country. If the economic condition of the country is developing, then the banking industry also developing. But if the economic condition is in crisis then this could result in an impact on the banking industry. Therefore the national macroeconomic condition should be noticed for lending credits. This study aims is to see the development of credit growth and the NPL in Indonesia and to determine the influence of macroeconomic variables on the bank's NPL credit. This study used qualitative and quantitative methods. Quantitative method used dynamic panel data from 2006 through 2014. The result found that the credit growth in the period was increasing. The increasing credit was followed by the increase of the NPL. This study also found that macroeconomic condition, particularly the GDP had a negative influence on the NPL, meaning that the increasing of economic growth would reduce the NPL. This research also found that interest rate loan and inflation have positive and significant effect to the NPL. Therefore, government should work closer with Central Bank to make a better macroeconomic condition in order to decrease the NPL in Indonesia.*

*Keywords: macroeconomic, banking industry, non performing loan*

Ahmadrswan Nasution (Education and Training Center, Statistics Indonesia)

### **THE ROLE OF SOCIAL CAPITAL ON HOUSEHOLD POVERTY REDUCTION IN RURAL AREAS OF INDONESIA**

JEKP, Vol. 7, No. 2, December 2016, pp. 171-183

#### **Abstract**

*Indonesia's poverty reduction policies tend to focus on economic approaches such as on the development of infrastructures (physical capital), credit assistance (financial capital), and education and health support (human capital). Actually, poverty is a complex problem, involving many resources, including social capital. This study investigates empirically the impact of the social capital on poverty in the rural areas of Indonesia. The social capital is measured by the composite index of the components of social capital (trust, norms, mutual cooperation, participation in social activities, and social networks), while the poverty is measured by household per capita expenditure. The method of analysis using a multiple linear regression model on a sample of 40,474 households. The source of the data from the results of a national survey conducted by BPS-Statistics Indonesia, namely Susenas 2012 and Podes 2011. The analysis showed that the average index of social capital of the rural households around 52.18 (maximum 100). The components of most instrumental in the formation of social capital of poor households are mutual trust. The results of further analysis showed that social capital together with human capital, financial capital, and physical capital have a positive effect on per capita household expenditure, so that they can contribute to reduce poverty. This finding suggests that the existence of social capital plays an important role in poverty reduction in the rural areas. Thus, the government and related agencies should endorse policies that facilitate to the strengthening of social capital for the poor households.*

*Keywords: social capital, household per capita expenditure, poverty, rural areas, Indonesia*

Daru Mulyono (Center for Agricultural Production Technology, Agency for the Assessment and Application of Technology)

### **UPSTREAM-DOWNSTREAM POLICY HARMONIZATION IN THE DEVELOPMENT OF CULTIVATION AND NATIONAL COCOA PROCESSING INDUSTRY**

JEKP, Vol. 7, No. 2, December 2016, pp. 185-200

#### **Abstract**

*Cocoa productivity in Indonesia is relatively low as it was recorded in 2013 production of cocoa beans that reached only 414 kg/ha/year. This was far below the ideal average that may reach 2,000 kg/ha/year. Similarly, in the cocoa processing industry is experiencing difficulties due to shortage of raw material supply cocoa beans that have not been optimally developed. The objective of study is to obtain a clearer understanding of the national cocoa agribusiness development conducted through the policy harmonization upstream-downstream in the development of cocoa cultivation and cocoa processing industry. This study is an analytical descriptive study with data analysis carried out through (a) a review of policy documents related to the development of cocoa and (b) the formulation of a concept for improving cocoa production and developing the cocoa processing industry in the country. In order to support national cocoa agribusiness development, the government has implemented Gernas Cocoa Program to increase cocoa production and to impose the Export Duty of cocoa beans regulation through Finance Minister Regulation No. 67/PMK.011/2010 to ensure the supply of raw cocoa beans in the cocoa processing industry. The result of Gernas Cocoa Program and Export Duty of cocoa beans implementation shows that volume of cocoa beans exports continues to fall and by contrast the volume processed cocoa exports continue to rise. The impact of these policies will be more evident in the development of agribusiness cocoa when it is done through harmonious and synergetic policy formulation in the aspects of both cocoa cultivation (upstream) and cocoa processing industry (downstream).*

*Keywords: cocoa cultivation, processing, cocoa agribusiness, industrial policy*

Saut H. Siahaan (Pusat Penelitian Perkembangan Iptek, Indonesian Institute of Sciences)

**INDUSTRIAL CLUSTER ANALYSIS IN PERSPECTIVE OF MANAGEMENT  
SUPPLY CHAIN OIL PALM IN NORTH SUMATERA PROVINCE**

JEKP, Vol. 7, No. 2, December 2016, pp. 201-213

**Abstract**

*Downstream palm oil industry development through the application of cluster concept in North Sumatera Province is targetted to increase added value and competitiveness of product. However, whether this concept can boost the competitiveness of the palm oil industry or not it remains a challenge. The diversity of actors in the supply chain industry and competition in a global market that includes environmental aspects relates to this issue. Therefore, industry cluster analysis from perspective of the supply chain of palm oil processing industry becomes interesting. This study uses a qualitative exploratory approach, and primary data obtained by in-depth interviews of actors in the supply chain of palm oil processing industry in the North Sumatera Province in 2015. The result showed that smallholder plantations have a considerable contribution in supplying Fresh Fruit Bunches (FFB) raw materials for palm oil processing industry, hence the existence of smallholder plantations can not be excluded in the development of downstream palm oil industry. Furthermore, the results of this study also indicate that there should be encouragement for the establishment of supply chain structure of the palm oil industry, improvement strategies, distribution, and justice so that the distribution of benefits for the actors in the supply chain can be developed. In this regard, efforts to promote sustainable plantation industry business is still needed, especially to preserve the biodiversity and beneficial for all actors in the supply chain of palm oil industry.*

*Keywords: cluster industry, supply chain, palm oil, downstream industry*

Lukman Adam (Research Centre, Indonesian House of Representative Expertise Agency)

**POLICY OF PROHIBITION ON FISHING OF YELLOWFIN TUNA: IMPACT ANALYSIS AND SOLUTION**

JEKP, Vol. 7, No. 2, December 2016, pp. 215-227

**Abstract**

*The Minister of Marine Affairs and Fisheries Regulation, No. 4/2015 on Prohibition of Fishing in Fisheries Management Area (WPP) RI 714 is a distinctive regulation in the management of fisheries in Indonesia. The regulation contains the prohibition of Yellowfin Tuna fishing at coordinates 126-132 °E and 4-6 °S in the Banda Sea, from October to December. This study aims to evaluate the concept and the reasons for the issueing of the Regulation, to analyze the impact of technical, socio-economic, and environment, and to offer the solutions as well as the reorientation of policies required. The study uses descriptive qualitative research, while the analysis used in this research is descriptive analysis. Technical impacts found are prohibition the use of purse seine since 2015 and the modernization of the fishing fleet fishery products. Socio-economic impacts are fishermen income per capita per year in 2015 that increased by 1.46 percent and there are no social impact for fishermen. Environmental impacts, namely the potential for yellowfin tuna remained stable and high awareness of fishing on the environment. Reorientation of government policy should have begun to include fisheries. The central government readiness for imposing a closed fisheries management with dimensions based on location and time must be applied at the fisheries area that had been over-exploited and spawning areas or migratory fish. However, this policy should be supported by more adequate studies and data.*

*Keywords: yellowfin tuna, sustainable fisheries, close fisheries management, fisheries management area, fish resources*